

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
PENDAPATAN - LRA	946.853.077.993,00	972.242.373.625,39	102,68	1.220.476.081.088,69
PENDAPATAN ASLI DAERAH	101.219.000.000,00	85.037.055.386,71	84,01	100.975.564.957,57
Pendapatan Pajak Daerah	29.026.000.000,00	28.487.061.805,00	98,14	30.189.400.658,00
Pendapatan Retribusi Daerah	4.899.000.000,00	2.802.140.946,50	57,20	3.738.661.449,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000,00	2.073.589.783,33	69,12	1.759.160.257,30
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64.294.000.000,00	51.674.262.851,88	80,37	65.288.342.593,27
PENDAPATAN TRANSFER	818.829.277.993,00	859.882.828.238,68	105,01	1.092.656.218.392,12
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	675.718.618.000,00	715.482.270.169,00	105,88	861.847.458.222,00
Dana Bagi Hasil Pajak	76.220.812.000,00	73.597.425.102,00	96,56	116.429.339.643,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	78.682.307.000,00	123.484.470.497,00	156,94	191.564.405.242,00
Dana Alokasi Umum	401.337.761.000,00	399.247.165.000,00	99,48	440.240.422.000,00
Dana Alokasi Khusus	119.477.738.000,00	119.153.209.570,00	99,73	113.613.291.337,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	48.548.591.000,00	48.548.591.000,00	100,00	41.591.875.000,00
Dana Penyesuaian	48.548.591.000,00	48.548.591.000,00	100,00	41.591.875.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	57.567.052.993,00	62.789.397.217,68	109,07	122.374.609.670,12
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	57.567.052.993,00	62.789.397.217,68	109,07	122.374.609.670,12
Bantuan Keuangan	36.995.016.000,00	33.062.569.852,00	89,37	66.842.275.500,00
Bantuan Keuangan Provinsi	36.995.016.000,00	33.062.569.852,00	89,37	66.842.275.500,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.804.800.000,00	27.322.490.000,00	101,93	26.844.297.739,00
Pendapatan Hibah	26.804.800.000,00	27.322.490.000,00	101,93	26.844.297.739,00
BELANJA	1.093.764.628.464,00	1.024.031.018.357,66	93,62	1.146.555.333.892,44
BELANJA OPERASI	816.732.781.105,00	756.561.301.247,00	92,63	834.627.994.184,44
Belanja Pegawai	403.554.074.205,00	386.054.471.569,00	95,66	391.334.909.403,00
Belanja Barang dan Jasa	379.386.171.900,00	341.043.554.087,00	89,89	395.461.753.356,44
Belanja Hibah	33.591.535.000,00	29.298.275.591,00	87,22	46.692.331.425,00
Belanja Bantuan Sosial	201.000.000,00	165.000.000,00	82,09	1.139.000.000,00
BELANJA MODAL	228.968.408.359,00	220.756.462.110,66	96,41	311.715.302.708,00
Belanja Tanah	1.143.000.000,00	922.500.000,00	80,71	12.298.968.500,00
Belanja Peralatan dan Mesin	32.120.260.320,00	29.748.022.380,00	92,61	42.997.941.318,00
Belanja Gedung dan Bangunan	33.508.224.320,00	32.883.633.009,00	98,14	52.419.507.854,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	158.835.832.899,00	153.927.062.066,66	96,91	201.516.008.439,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.361.090.820,00	3.275.244.655,00	97,45	2.482.876.597,00
BELANJA TAK TERDUGA	48.063.439.000,00	46.713.255.000,00	97,19	212.037.000,00
Belanja Tak Terduga	48.063.439.000,00	46.713.255.000,00	97,19	212.037.000,00
TRANSFER	24.955.269.918,00	30.320.916.918,00	121,50	29.586.701.909,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	24.955.269.918,00	30.320.916.918,00	121,50	29.586.701.909,00
Bantuan Keuangan Ke Desa	24.016.568.000,00	29.382.215.000,00	122,34	28.728.293.000,00
Bantuan Keuangan Ke Partai Politik	938.701.918,00	938.701.918,00	100,00	858.408.909,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(171.866.820.389,00)	(82.109.561.650,27)	47,78	44.334.045.287,25
PEMBIAYAAN	171.866.820.389,00	171.866.820.389,63	100,00	127.532.775.102,38
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	171.866.820.389,00	171.866.820.389,63	100,00	132.239.775.102,38
Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	171.866.820.389,00	171.866.820.389,63	100,00	132.239.775.102,38
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	4.707.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	4.707.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	171.866.820.389,0	171.866.820.389,63	100,00	127.532.775.102,38
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	89.757.258.739,36		171.866.820.389,63

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Prabumulih bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Prabumulih. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Prabumulih, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

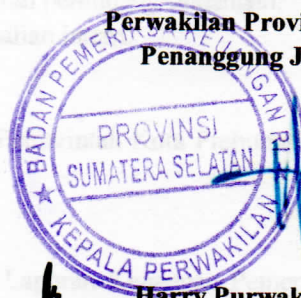
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Prabumulih tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 02.B/LHP/XVIII.PLG/03/2021 tanggal 8 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palembang, 8 Maret 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Harry Purwaka, Ak., CA., CSFA
Register Negara Akuntan No. RNA - 7704